

## Strategic Analysis of the North Sumatra Regional Development Planning Agency in the Development of Bumdes and the Village Economy

### Analisis Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam Pengembangan Bumdes dan Ekonomi Desa

Ahmad Fikri Ihsan Nasution<sup>1)</sup>; Marliyah<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ekonomi Islam FEBI UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [lhsanfikri32@gmail.com](mailto:lhsanfikri32@gmail.com); <sup>2)</sup> [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022]

Revised [15 April 2022]

Accepted [22 April 2022]

#### KEYWORDS

Strategy, Village Economic and Development, North Sumatra Regional Development Planning Agency

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam pembangunan bumdes dan perekonomian pedesaan, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan bumdes dan ekonomi pedesaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah suatu badan atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDASU) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling

#### ABSTRACT

The North Sumatra Regional Development Planning Agency is a government agency or agency that aims to coordinate development in the North Sumatra region. This study was conducted by the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDASU) of North Sumatra. This study uses qualitative research methods with exploratory research types with data collection methods through observation, interviews and documentation. The selection of informants in this study was based on purposive sampling.

## PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. Bappededa Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan mengandalkan Hasil sumber daya yang ada harus memiliki orientasi yang menyeluruh dan lengkap dengan tetap berpegang pada prinsip keutamaan.

Bappededa Provinsi Sumatera Utara telah menganggap bahwa pengembangan Bumdes dan Ekonomi Desa sangat penting bagi kelangsungan hidup instansinya. Badan Usaha Milik Desa adalah Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan struktural yang harus muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dimana perubahan itu terjadi secara alami, dengan anggapan bahwa setiap anggota masyarakat adalah pelaku sosial ekonomi yang terlibat dalam pembangunan. Proses perubahan, dengan produktivitas yang kurang lebih seimbang dan bertindak secara efektif atau rasional.

Ekonomi desa adalah salah satu objek kajian yang seolah tidak pernah ada habisnya, desa sebagai salah satu kesatuan wilayah administrasi terkecil, mengalami perubahan secara langsung dan tidak langsung sebagai kesatuan wilayah, sehingga banyak intervensi yang masuk ke desa baik melalui program pemerintah maupun instansi swasta maupun LSM.

Bumdes dalam Penyelenggaraan dan kepemilikan modal Bumdes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes didirikan untuk menerima kegiatan yang dikembangkan menurut adat, kegiatan berdasarkan program pemerintah dan segala kegiatan lain yang menunjang peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan bumdes diperlukan agar bumdes yang ada dapat berfungsi sesuai dengan

perannya. Bumdes diharapkan mampu mendorong dan mendorong perekonomian pedesaan. Tujuan dan sasaran Bumdes dapat tercapai jika dikelola secara terarah dan profesional. Bumdes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa.

## LANDASAN TEORI

Teori pada dasarnya adalah tahap membedah dan menganalisis masalah topik penelitian, membuat objek dan ruang lingkup penelitian lebih jelas. Kajian ini dapat menjelaskan beberapa kajian dan teori, antara lain:

### Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani Strategos, yang merupakan gabungan dari Stratos atau prajurit dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi adalah penyambung untuk sampai ke tujuan. Strategi adalah seni menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan di bawah kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi dapat dikatakan sebagai tindakan penyesuaian dalam menanggapi beberapa situasi lingkungan yang dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga secara jelas menunjukkan apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang akan dilaksanakan guna mencapai apa yang hendak dicapai.

Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan dan tindakan yang harus diambil organisasi untuk mempertahankan keberadaannya dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif..

### Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling berkaitan. Manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Fungsi merencanakan (merencanakan) membutuhkan pemahaman mana posisi daerah dan ke mana mau melangkah ke depan, bagaimana formulasi visi dan misi, dan strategi apa yang dipilih untuk mencapai target. Fungsi mengorganisasikan adalah bagaimana pemimpin daerah mengelola semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya maupun alam, untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Fungsi mengarahkan adalah bagaimana pemimpin mengarahkan ke sumber daya agar mencapai visi, misi, dan dapat ditentukan dengan memberikan motivasi dan melakukan komunikasi terus-menerus. Fungsi mengendalikan (control) merupakan fungsi terakhir, yang dikendalikan dan dilaporkan kinerja nisasi dan daerahnya.

Perencanaan adalah kunci penting untuk memulai sebuah program. Selama perencanaan, pilihan dibuat, langkah-langkah disusun untuk membimbing sehingga kehendak dapat ditangkap pada waktu yang ditentukan.

Perencanaan didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan dan penetapan pilihan tindakan yang dilakukan, serta memutuskan langkah untuk mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan. Rencana adalah pernyataan yang dibutuhkan dan harus dieksekusi agar tujuan tercapai. Perencanaan mencakup sumber daya yang dibutuhkan, tugas atau komitmen yang harus diselesaikan, tindakan atau cara terbaik untuk membuat keputusan, dan waktu yang dialokasikan untuk mengambil tindakan. Perencanaan membantu mengalokasikan sumber-sumber untuk mendayagunakan kekuatan dalam mencapai tujuan. Perencanaan berorientasi pada perubahan.

### Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan ke adaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut di nyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare). Secara filosofis pendefinisian tersebut dapat diterima, tetapi yang jelas definisi tersebut kurang operasional, sedangkan pada umumnya para ahli pengembangan wilayah ingin mencari tolok ukur kapan pembangunan itu telah terjadi. Jadi secara filosofis diakui bahwa setiap individu memiliki aspirasi yang dinamis. Satu tujuan tercapai muncul aspirasi yang lain.



Meningkatkan pendidikan, pendapatan akan mengarah pada aspirasi lain, dan ini semua adalah pembangunan.

Pembangunan tanpa persiapan yang matang bakal berujung pada sekadar penyebaran proyek. Akibatnya, kualitas pelaksanaan, waktu kerja, dan anggaran, tidak dapat berjalan optimal. Perencanaan pembangunan memandu pelaku pembangunan menentukan prioritas dan memastikan hal yang paling penting untuk mendapat perhatian utama.

Perencanaan sistematis akan membantu proses kontrol, membantu mengantisipasi masalah sehingga jika ada yang tidak sesuai, segera dapat dievaluasi dengan baik, cepat, dan jelas. Di sinilah fungsi manajemen berperan penting dan menentukan pencapaian tujuan.

Dalam konteks pemerintahan, perencanaan adalah sebagian alat dari akuntabilitas yang outputnya kelak berupa laporan. Jadi laporan dibuat untuk melihat apakah rencana sudah dijalankan atau belum, sudah berhasil atau tidak. Sebagai bagian dari alat akuntabilitas setidaknya ada yang disebut Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

## **Pengertian BUMDES dan Ekonomi Desa**

Badan Usaha Milik Desa (atau singkatan dari Bumdes adalah usaha desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Bumdes adalah singkatan Badan Usaha Milik Desa secara sederhana, Bumdes adalah badan usaha, dengan tujuan mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat.

Bumdes sudah ada sejak sebelum UU Desa No 6/2014. Tetapi paska UU Desa, Bumdes menjadi semakin strategis. Pendirian Bumdes menjadi Program Prioritas Kementerian Desa di tahun 2017.

Bumdes lahir sebagai lembaga desa yang bekerja untuk mensejahterakan rakyat, menggunakan aset dan potensi desa serta berbekal modal investasi dari desa. Dengan demikian, bukan berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah Bumdes.

Karena di desa masih ada banyak lembaga ekonomi yang tidak masuk dalam cakupan Bumdes bahkan tidak bisa di BUMDes-kan. Maka perlu digaris-bawahi, yang paling menentukan berkembang dan tidaknya ekonomi desa adalah Kepala Desa.

Bumdes harus lahir sesuai dengan kehendak semua penduduk desa, diadopsi dalam musyawarah desa (Musdes). Musdes merupakan forum utama untuk mengambil berbagai keputusan besar di Bumdes, mulai dari nama lembaga, pilihan pengurus, hingga jenis usaha.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena sosial dengan memberikan gambaran yang rinci berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan pembangunan bumdes dan perekonomian desa.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara. Kajian ini menyangkut Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Utara dalam bidang pembangunan Bumdes dan perekonomian daerah sebagai lembaga yang mengetahui tentang strategi pembangunan Bumdes dan ekonomi pedesaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Utara.

Penelitian selanjutnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil Riset DPRD Porkir Setelah di artikulasikan dalam isu seperti Kabupaten Deli Serdang, masyarakat menuntut perhatian serius dari Pemprov Sumut terkait pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, khususnya di bidang pendidikan, Jalan Pancing menuju Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Medan (UMA), Minimnya peran dan fungsi Desa untuk meningkatkan potensi ekonomi dalam berbagai sektor yang dapat digerakkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## Informan Penelitian

Penelitian akan menggunakan informan sebagai objek informasi dalam penelitian ini terkait dengan strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata atau tindakan yang memberikan data dan informasi tentang strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam mengembangkan Bumdes dan Ekonomi Desa.

Penelitian informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dapat memberikan jawaban-jawaban yang peneliti inginkan. Kemudian informan selanjutnya Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

## Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan tentang Pengembangan Bumdes dan Ekonomi Desa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dan Kepala SUB Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA
- b. Data sekunder adalah data yang telah jadi dan siap pakai seperti dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :
  1. Data Identitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Data RKPD Provinsi Sumatera Utara 2020
  3. Data RKPD Provinsi Sumatera Utara 2021
  4. Data RPJMN 2020-2024
  5. Data Renstra 2019
  6. Data BPKAD Provinsi Sumatera Utara

## Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengelola Bumdes dan Ekonomi Desa di Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Wawancara dilakukan berjalan dengan lancar, dengan beberapa informan yang sudah ditentukan. Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip penting, dan lain-lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sasaran dan Strategi Mengembangkan BUMDES dan Ekonomi Desa

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah sejak lama yang di jalankan oleh pemerintahan melalui berbagai program. Namun lebih kepada program yang bersifat top down- inisiasi dari pusat, desa hanya pelaksana. Bentuk pengembangannya pun lebih condong seragam, tidak didasarkan pada kondisi, kultur dan potensi di daerah yang cenderung berbeda-beda.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat sasaran prioritas dalam membangun desa menata kota (MDMK) Provinsi Sumatera Utara yang terkait langsung dengan pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Pembangunan Tahun 2021**

<b>Fokus Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021</b>	<b>Sasaran Prioritas Membangun Desa Menata Kota Tahun 2021</b>
1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas SDM</li> <li>b. Pengentasan Kemiskinan</li> <li>c. Revitalisasi Balai Latihan Kerja</li> <li>d. Link and Match dengan BUMN/BUMD/SWASTA</li> <li>e. Penguatan Kewirausahaan/KUKM</li> <li>f. Peningkatan Produktivitas tenaga kerja &amp; Penciptaan Lapangan Kerja</li> </ul>
2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Akses &amp; Kualitas Tenaga Pendidik Vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Industri</li> <li>b. Revitalisasi Sekolah Menengah Umum &amp; Kejuruan</li> <li>c. Pemerataan Sarana &amp; Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan</li> <li>d. Pemerataan Akses &amp; Layanan Pendidikan Khusus</li> </ul>
3. Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pusat-Pusat Produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aksesibilitas Jalan Ke Daerah Pariwisata dan Agraris</li> <li>b. Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Transportasi</li> <li>c. Peningkatan Kuantitas &amp; Kualitas &amp; Akses Sumber Daya Air</li> <li>d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Desa</li> <li>e. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi dan Informasi</li> </ul>
4. Peningkatan Jangkauan Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan</li> <li>b. Sarana, Prasarana Kesehatan</li> <li>c. Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi Masyarakat</li> <li>d. Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>e. Pemberdayaan Keluarga</li> </ul>
5. Pemulihan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Sarpras Kesehatan</li> <li>b. Jaring Pengaman Sosial</li> <li>c. Stimulus Ekonomi</li> </ul>

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Pada dasarnya fokus pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sudah selaras dengan fokus pembangunan nasional pada tahun 2021, keselarasan tersebut dapat dilihat pada sinkronisasi sasaran pembangunan nasional pada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara (RKPD) tahun 2021. Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2021 merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Revolusi mental dan pembanguan kebudayaan
4. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil

Penelaahan porkir DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam program pengembangan ekonomi lokal memiliki kegiatan seperti, Penilaian dan lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara di Desa Hessa Air Genting, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia dengan perangkat daerah, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Hasil telaahan Porkir DPRD setelah dilakukan pemetaan terhadap kewenangan dirumuskan dalam permasalahan sebagaimana di Kabupaten Deli Serdang , Masyarakat memohon perhatian serius kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, Minimnya peran dan fungsi Desa untuk meningkatkan potensi ekonomi dalam berbagai sektor yang dapat digerakkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Bumdes. Bumdes memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli baik dalam bentuk dividen maupun pajak dan retribusi. Sebagai bagian dari dunia bisnis, Bumdes juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser.

Terdapat 8 (Delapan) Bumdes Provinsi Sumatera Utara, yaitu PT. Bank Sumut, PT. Dhirga Surya, PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Pembangunan Prasarana , PDAM Tirtanadi, PD. Aneka Industri dan Jasa, PT. Kawasan Industri Medan dan PT. Bangun Asuransi Askrida. Namun belum semuanya mampu kontribusi bagi PAD. Untuk itu Bumdes yang belum berkontri optimal diarahkan untuk lebih meningkatkan peranannya sesuai core bussiness yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada termasuk mempertimbangkan kedekatan/keterkaitan bisnis, mengeluarkan bidang-bidang bisnis yang berdasarkan analisis tidak mampu bersaing di pasar, pendanaan, memangkas struktur organisasi yang dipandang tidak memiliki wilayah tugas yang tidak jelas bahkan tumpang tindih dan sebagainya.

#### Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2021 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih dirasakan ditengah masyarakat, namun arahan terhadap upaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Untuk meningkatkan pendapatan daerah akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar di beberapa kabupaten/kota
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan
4. Meningkatkan Deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana alokasi umum dalam dana perimbangan pada alokasi pendapatan transfer daerah
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan menjadi bagian dari sumber pembiayaan pada periode anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mendorong investasi daerah, optimalisasi peranan BUMD sangat diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang in line mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup:

1. Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga dan
4. Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip money follow programme priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2021. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2019 adalah tersedianya dokumen RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan dokumen perubahan RKPD yang juga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja sesuai dengan amanat regulasi. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif.

**Tabel 2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

No	Indikator	2017	2018	2019	Target RPJMD 2019
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	6,99	--	3,21	11,5
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	24,65	22,60	24,74	25,00
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	18,05	4,43	18,24	19,00
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	35:65	40:60	22:78	36:64
6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	1.80	2.90	4.70	11,03
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Provsu

Selain itu dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar 22:78, sementara bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2019 sebesar 4.70 %, dan penetapan APBD selama ini telah tepat waktu. Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan

pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2018, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi Pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja sesuai dengan amanat regulasi. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan capaian makro ekonomi wilayah Dataran Tinggi tersebut, maka terdapat berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada tahun 2021 diantaranya dengan:
  - a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia unggul
  - b. Perluasan akses pendidikan menengah
  - c. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas
  - d. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan
  - e. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Agraris Dan Pariwisata Berkelanjutan
  - f. Pemulihan pandemi covid-19
2. Faktor-faktor yang menghambat strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran oleh badan perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara seperti nilai tukar rupiah yang menunjukkan peningkatan, kurangnya balai latihan kerja, rendahnya kepercayaan public, rendahnya angka lanjut sekolah dari jenjang SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dikarenakan kondisi keluarga kurang mampu, serta penyebaran Covid-19.
3. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara betul-betul melihat skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, diadakan pembinaan dan pelatihan agar sumber daya manusia yang lebih kompeten lagi, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMK sehingga membentuk sinergi kebijakan yang unggul dengan program-programnya agar upaya penanggulangan Kemiskinan Dan pengangguran di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara segera ditangani.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Karena hal ini merupakan permasalahan yang serius yang seharusnya bisa tertangani untuk memajukan Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda sumutprov.go.id  
 Bratakusumah Deddy Supriady dan Riyadi, (Jakarta: Perencanaan Pembangunan 2004)  
 Budio, Sesra , 2.2 (2019), (Strategi Manejemen Sekolah)  
 Dr. Widodo Sigit Pudjianto (Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, Buku Kompas, 2019)  
 Dr. Widodo Sigit Pudjianto (Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, Buku Kompas, 2019)  
 David Prasetyo, Peran BUMDES Dalam Membangun Desa (Pontianak, CV Derwati Press, 2019)  
 Eka Prasetya, Inspirasi Sektor Usaha Bumdes (Yogyakarta, Hijaz Pustaka Mandiri, 2020).  
 IR. Ali Kabul Mahi, Dr Sri Indra Trigunarso, Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi ( Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017),  
 Mudrajat Kuncoro, Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi (Jakarta ,PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018),